

LAPORAN SINGKAT

KOMISI IX (BIDANG DEPARTEMEN KESEHATAN, DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI, BADAN PENGAWAS OBAT & MAKANAN, DAN BKKBN)

Tahun Sidang	: 2006-2007
Masa Persidangan	: III
Jenis	: Rapat Dengar Pendapat Umum
Dengan	: 1. Kepala Badan POM; 2. DPP GP Jamu Pusat; 3. Pimpinan GP Jamu Tradisional Jawa Tengah; 4. Pengurus Koperasi Jamu Tradisional Jawa Tengah.
Sifat	: Terbuka
Hari, tanggal	: Senin 22 Januari 2007
Waktu	: Pukul 10.00. – 12.00 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi IX DPR-RI Gedung Nusantara I Jln. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Pusat
Acara	: Membicarakan tindak lanjut masalah jamu tradisional yang diduga mengandung bahan kimia
Ketua Rapat	Max Sopacua, SE, M.Sc. / Wakil Ketua Komisi IX DPR RI
Sekretaris	: Surjadi/Kabag. Sekretariat Komisi IX DPR RI
Anggota yang hadir	: 37 Anggota dari 47 Anggota Komisi IX DPR RI, 10 orang Ijin,

I. PENDAHULUAN

Ketua Rapat membuka Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi IX DPR-RI dengan Kepala Badan POM, DPP GP Jamu Pusat, Pimpinan GP Jamu Tradisional Jawa Tengah dan Pengurus Koperasi Jamu Tradisional Jawa Tengah pukul 10.05 WIB setelah kuorum terpenuhi sebagaimana Peraturan Tata Tertib DPR RI Pasal 99 ayat (1) dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

II. POKOK PEMBICARAAN

Diinformasikan bahwa RDPU ini dalam rangka menindaklanjuti hasil kunjungan lapangan Komisi IX DPR RI pada tanggal 26 dan 27 Desember 2006 ke Koperasi Jamu (KOPJA) Aneka Sari di Gentasari, Kroya, Cilacap, Jawa Tengah, sehubungan dengan adanya issue yang dilansir oleh media cetak dan elektronik bahwa jamu tradisional asal Cilacap terindikasi menggunakan campuran bahan kimia sehingga dapat membahayakan kesehatan bagi masyarakat yang mengkonsumsinya. Sehubungan dengan hal di atas dan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut maka Komisi IX DPR RI mengundang Badan POM, DPP GP Jamu Pusat, Pimpinan GP Jamu Tradisional Jawa Tengah dan Pengurus Koperasi Jamu Tradisional Jawa Tengah untuk di dengar keterangannya.

III. RANGKUMAN

Setelah mendengarkan pertanyaan/saran dan harapan Anggota serta jawaban dari Kepala Badan POM, DPP GP Jamu Pusat, Pimpinan GP Jamu Tradisional Jawa Tengah dan Pengurus Koperasi Jamu Tradisional Jawa Tengah maka sebelum Rapat ditutup, Ketua Rapat menyampaikan dan membacakan beberapa rangkuman rapat sebagai berikut :

1. Komisi IX DPR RI sepakat bahwa jamu merupakan warisan budaya yang sangat potensial dikembangkan sebagai salah satu alternatif pengobatan yang murah dan terjangkau oleh masyarakat sehingga harus dilestarikan dan dilindungi.
2. Komisi IX DPR RI mendesak pemerintah agar melakukan pembinaan terhadap industri jamu tradisional, menyangkut masalah standard teknis persyaratan jamu, dukungan pemasaran dan permodalan
3. Komisi IX DPR RI dapat memahami bahwa industri jamu dan pemasaran jamu tradisional di Indonesia merupakan sumber mata pencarian masyarakat yang dibutuhkan dan perlu pendekatan dalam penyelesaian, disamping harus mengikuti standard teknis persyaratan jamu harus didukung dengan pendekatan politis yang menguntungkan semua pihak.
4. Komisi IX DPR RI akan membentuk Tim Kecil yang beranggotakan Anggota Komisi IX DPR RI, Timja dari Badan POM RI ditambah dengan perwakilan Fraksi-fraksi (Poksi) bersama dengan Perwakilan dari Badan POM, DPP GP Jamu Pusat, GP Jamu Tradisional Jawa Tengah dan Koperasi Jamu Tradisional Jawa Tengah (diharapkan nama-nama yang masuk dalam Tim agar diserahkan kepada Komisi IX DPR RI setelah rapat selesai)
5. Komisi IX DPR RI mengharapkan agar Badan POM atau pihak terkait dapat membatasi statement-statement kepada media massa sebelum persoalan selesai.

Rapat ditutup pukul 12.15 WIB

Pemerintah,
Kepala Badan POM

Dr. HUSNIAH RUBIANA THAMRIN AKIB,
MS,M.Kes.,Sp.FK

Jakarta, 22 Januari 2007

Pimpinan Komisi IX DPR-RI
Wakil Ketua,

MAX SOPACUA, SE. M.Sc.

Pemerintah,
Kepala Badan POM

Dr. HUSNIAH RUBIANA THAMRIN AKIB,
MS,M.Kes.,Sp.FK